



KR-Franz Boddikusumo



KR-Franz Boddikusumo

Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Sekda DIY K Bashara Aji dan Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyampaikan keterangan pers (atas).

Salah satu sudut tempat relokasi PKL Malioboro di eks Gedung Bioskop Indra Yogyakarta yang diresmikan (kiri).

Sultan Resmikan Teras Malioboro Direlokasi, PKL Bebas Retribusi 1 Tahun

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono (HB) X meresmikan tempat relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro, pada Rabu (26/1). Dua tempat yang dijadikan sebagai lokasi baru untuk PKL yakni di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata (Dispar) DIY. Bioskop Indra diganti nama menjadi Teras Malioboro 1 dan Dispar

DIY diganti menjadi Teras Malioboro 2. Setelah proses relokasi dilakukan nantinya tidak ada lagi PKL yang berjualan di sepanjang trotoar Malioboro. Adapun untuk proses pemindahan PKL ke lokasi baru akan dimulai awal Februari 2022 mendatang.

"Begitu relokasi dilakukan kami sepakat secara otomatis akan mengeluarkan keputusan yang baru akan kita desain.

Bagaimana PKL pindah di Teras Malioboro 1 maupun Teras Malioboro 2 jadi tidak boleh lagi ada PKL yang jualan di sepanjang Malioboro. Kalau nanti masih ada yang jualan, kesian mereka yang pindah," kata Sultan saat meresmikan Teras Malioboro 1 yang ada di Kawasan Malioboro Rabu (26/1).

Sultan mengatakan, relokasi PKL dilakukan sebagai upaya dalam menumbuh-

kembangkan PKL Malioboro. Untuk itu Sultan berharap agar PKL yang dipindah memiliki pemahaman yang sama untuk mengembangkan PKL. Bukan karena fasilitas yang ada disini yang jadi motivasi. Sebaliknya lebih pada upaya bersama untuk berdagang, tumbuh dan berkembang bersama. Bahkan sebagai bentuk dukungan bagi para PKL, pihaknya juga membebaskan

biaya retribusi selama satu tahun bagi PKL yang dipindah ke lokasi baru. Adapun jumlah PKL yang terdata akan dipindahkan ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro ada 1.838 PKL.

"Bukan hanya PKL, tetapi Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta akan bersama-sama menopang PKL. Sehingga Pemda DIY dan Pemkot Yogya tidak akan menarik retribusi kepada

para pedagang di Teras Malioboro selama satu tahun anggaran. Pembebasan biaya retribusi dilakukan untuk memberikan ruang guna mempromosikan lokasi baru yang ditempati PKL. Promosi ini dilakukan bersama-sama antara pemerintah, PKL, dan pihak lainnya guna mendatangkan pengunjung ke tempat yang baru," paparnya.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Direlokasi

Sambungan hal 1

Lebih lanjut Sultan menambahkan, setelah relokasi Pemda DIY akan berjumpa dengan pemilik toko untuk mengembalikan aset mereka yaitu emperan toko yang selama ini digunakan PKL. Namun, pemilik toko diminta tidak memperluas toko, tetapi menjadikan emperan itu sebagai ruang publik (pejalan kaki). Dengan begitu nantinya Pemda sudah sah akan bekerja sama dengan UNESCO. Peralnya, pihaknya telah mengembalikan aset kepada pemiliknya yaitu pemilik toko. Mengingat pada bulan Juli, rencananya tim dari UNESCO akan datang melakukan verifikasi.

"Setelah diserah terimakan, pemilik

toko tidak boleh melebarkan jangan tokonya *jembanke* (dilebarkan) untuk jualan ya jangan. Karena kalau saya tidak mengatur seperti ini secara tidak langsung saya ikut melanggar. Peralnya mengeluarkan keputusan sementara ada sebagian bukan asetnya Pemda ya yang ruang publik 5 meter tadi itu," terang Sultan.

Sedangkan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menyatakan, lokasi baru yang ditempati oleh PKL dapat menjadi pusat oleh-oleh maupun pusat jajanan. Dengan adanya lokasi baru tersebut, dapat menjadi pilihan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Malioboro.

"Pengunjung bisa memilih oleh-oleh dan jajanan di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, Pasar Beringharjo, serta sepanjang pertokoan. Malah semakin lengkap fasilitas yang diberikan ke pengunjung dengan harapan makin banyak yang datang ke Yogya," ungkap Heroe.

Terpisah Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi menyampaikan tempat ini mampu mawadahi setidaknya 800-an pelaku usaha khususnya PKL yang berjualan kawasan Malioboro selama ini. Para PKL akan mendapatkan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik, air, internet, tempat sampah serta diberikan lapak gratis. (Ria/Raf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005